

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS****¹Hera Fahdilah V, ² Alizar Isna, ³Slamet Rosyadi**^{1,2,3}Universitas Jenderal Soedirman¹herafahdilah11@gmail.com, alizar.isna@unsoed.ac.id, slamet.rosyadi@unsoed.ac.id

ABSTRACT

Poverty alleviation efforts continue to be carried out both at the central and regional levels. The community is expected to have independence in solving the economic problems faced. Problems in each region vary as well as at the village level. Independence in facing existing poverty problems is called empowerment. So that people are able to have fighting power to solve economic problems. Central and local governments need to provide opportunities for the community to increase capacity. With various empowerment programs carried out both for the community and for the apparatus, it is expected to be able to increase their respective capacities. This research was conducted in several villages in Kedungbanteng District to determine the driving and inhibiting factors for the implementation of empowerment programs. The research was conducted with a qualitative approach. The supporting factor for the smooth running of the empowerment program is the spirit of patriotism possessed by the actors and assistance from the Village Community Empowerment Social Office. Meanwhile, the inhibiting factors for the implementation of empowerment programs are poor human resources and dependence on funding from the government.

Keywords; empowerment, implementation, village.

A. PENDAHULUAN

Pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan baik itu pemerintah pusat dan daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pada tahun 2021 angka kemiskinan Indonesia mencapai 26,50 juta jiwa dari 273,87 juta jiwa. Untuk menunjang percepatan masyarakat perlu untuk ikut berperan dalam percepatan pengentasan kemiskinan dengan cara memberdayakan masyarakat (Siagian, 2004). masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang memiliki rasa tanggung jawab, dan mampu menyelesaikan masalah perekonomian baik itu secara individu atau kelompok. Program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan antara lain program partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Program pemberdayaan

masyarakat berupa pelatihan-pelatihan berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 89,2%. kemandirian masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian sangat dibutuhkan.

Tidak semua program-program pemberdayaan di atas, berhasil dalam implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian, hal-hal yang menjadi penghambat implementasi dan tercapainya tujuan program yaitu teknologi tepat guna yang belum sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat (Alfath, 2018), strategi bagi pembangunan dan pemasaran (Saputra, 2018), komunikasi antar aktor (Rizar, 2018), dan modal yang terbatas (Khusna dkk,2019).

Pemanfaatan dana desa tahun 2020 misalnya, pelaksanaannya mengacu pada: (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; (2) Peraturan Gubernur Jateng Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa; dan (3) Juga Peraturan Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020

Secara umum, pemanfaatan dana desa ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa atau biasa disingkat DD bersumber dari APBN sedangkan alokasi dana desa (ADD) bersumber dari APBD minimal 10%. Dana desa digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa (siltap,sarana prasarana pemdes), pembangunan desa (penataan ruang dan kawasan pemukiman), pembinaan masyarakat (linmas, kebudayaan, keagamaan, kelembagaam masyarakat), dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terkait dengan pelaksanaan dan penggunaan dana desa, sebagaimana kecamatan-kecamatan lain pada umumnya, Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas juga mengalokasikan dana desa yang diterimanya untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui dana desa. Berikut gambaran penerimaan dana desa di desa-desa Kecamatan Kedungbanteng di tahun 2019.

Tabel 1. Nama Desa dan Penerimaan Dana Desa Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2019

No	Nama Desa	Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai	Alokasi Dana Desa Pemberdayaan
1	Beji	411	1.284.701.018
2	Kebocoran	293	1.041.808.250
3	Dawuhan Wetan	289	1.055.229.000
4	Keniten	287	1.123.363.400
5	Kutaliman	273	1.287.166.000
6	Kedungbanteng	267	1.015.683.525
7	Kalisalak	250	1.085.417.114
8	Karangangka	246	982.069.442
9	Windu Jaya	216	1.088.071.280
10	Karang Salam	177	716.121.588
11	Melung	166	1.095.388.000
12	Kalikesur	145	1.002.772.131

Sumber: Data Induk Dana Desa Kabupaten Banyumas

Pemilihan lokasi desa penelitian berdasarkan kategori desa miskin, desa tidak miskin, dan sedang (tengah-tengan diantara desa kaya dan desa miskin). melihat dari seberapa warga desa yang layak mendapat bantuan langsung tunai. Desa tidak miskin yaitu Desa Kalikesur dengan jumlah warga mendapatkan bantuan langsung tunai sebanyak 145 orang, desa sedang (tengah-tengan diantara desa kaya dan desa miskin) yaitu Desa Kedungbanteng sebanyak 267 orang mendapatka bantuan langsung tunai, dan desa miskin yaitu Desa Beji sebanyak 411 orang penerima bantuan.

Besaran biaya yang dianggarkan selama tiga tahun berturut-turut membantu memahami seberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat. Berikut masing-masing biaya yang dikeluarkan banyaknya program yang berhasil dilaksanakan dan tidak berhasil dilaksanakan oleh Desa Beji, Desa Kedungbanteng, Desa Kalikesur tahun 2019

Tabel. 2 Data Jenis Program Pemberdayaan Desa Beji, Desa Kedungbanteng, Desa Kalikesur 2019

No	Program	Desa	Keterangan
1	Pertanian pembuatan saluran irigasi	Beji	Terlaksana
2	Aparatur barang dan jasa	Beji	Tidak Terlaksana
3	Dukungan penanaman modal	Beji	Tidak Terlaksana
4	perdagangan perindustrian kios desa	Beji	Terlaksana
5	Peningkatan kapasitas aparatur desa	Kalikesur	Terlaksana
6	pemberdayaan perempuan tataboga	Kalikesur	Terlaksana

7	Perdagangan perindustrian kios desa	Kalikesur	Belum sepenuhnya
8	Peningkatan aparatur desa (pelatihan aplikasi pemetaan)	Kedungbanteng	Terlaksana
9	Penyuluhan keluarga berencana	Kedungbanteng	Terlaksana
10	Perdagangan dan perindustrian kue basah	Kedungbanteng	Terlaksana
11	Peningkatan kapasitas BPD	Kedungbanteng	Terlaksana

Sumber: Laporan pertanggung jawaban realisasi APBD Beji, Kalikesur, Kedungbanteng

Berdasarkan tabel keterlaksanaan program pemberdayaan di tiga desa terdapat desa yang dapat melaksanakan sepenuhnya program pemberdayaan masyarakat dan terdapat desa yang belum dapat melaksanakan program pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Desa Kalikesur dan Desa Kedungbanteng sudah dapat melaksanakan seluruh agenda program pemberdayaan, sedangkan desa Beji terdapat dua agenda program pemberdayaan yang belum dapat dilaksanakan. Tujuan dari penelitian implementasi program pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas yaitu Menganalisis implementasi program pemberdayaan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

B. METODE

Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban (Mulyana, 2013). Metode penelitian kualitatif berdasarkan fenomenologi menuntut pendekatan holistik, mendalam objek penelitian dalam suatu konstruksi ganda, melihat objeknya dalam suatu konteks natural bukan parsial (Muhadjir, 2000). Tujuan penelitian kualitatif agar peneliti lebih mengenal lingkungan penelitian. Mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya (Mulyana, 2013).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Indiahono kebijakan publik adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik yang dihadapi. Sehingga kebijakan publik merupakan solusi dari masalah yang terjadi. Sedangkan konsisten dalam membenahi kebijakan adalah modal untuk mencapai tujuan (Casdimin dkk, 2020).

Kebijakan merupakan perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam menjalankan perannya. Segala tidak tanduk pejabat merupakan kebijakan yang ia buat. Para aktor berperan sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah tentu dilaksanakan hingga pemerintahan ditingkat paling rendah yaitu desa atau kelurahan (Rizar dkk, 2018). Berikut merupakan uraian hasil penelitian mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kedungbateng:

Implementasi Program Pembuatan Saluran Irigasi Desa Beji

Keberadaan kolam ikan, pasar ikan dan tempat penampungan sampah di Desa Beji membuat kebutuhan akan air bersih meningkat. Berawal dari keluhan warga akan ketersediaan air yang dirasa tidak cukup untuk mengairi lahan pesawahan dan perikanan pemerintah Desa Beji menanggapi keluhan warga Desa Beji. Kebiasaan pemilik kolam tidak berubah, sesuai dengan perasaan dan pemikiran pemilik kolam. Setelah saluran irigasi dibenahi warga mulai berfikir bagaimana cara menjaga kualitas air agar tetap baik untuk perikanan. Saluran irigasi yang dibenahi sesuai dengan arahan dari pemdes. Tidak menggunakan ahli bangunan dalam pembenahan namun sesuai dengan pemikiran pemdes dan warga. Pembenahan saluran irigasi pada tahun 2019 dilakukan pada sebagian kecil saluran yang menjadi persimpangan air menuju ke kolam dan pasar ikan sehingga tidak memakan banyak biaya terutama pada penggantian paralon yang semula milik warga menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Pelaksanaan program dilakukan dengan hati-hati dengan melibatkan warga yang terkena dampak dari program pembenahan saluran irigasi.

Implementasi Program Belanja Aparat Barang dan Jasa Desa Beji

Pembelian alat-alat kantor di Desa Beji belum dapat terlaksana. Ditahun 2019 pemerintah Desa Beji membutuhkan alat-alat kantor baru yaitu satu printer dan satu unit computer. Penempatan Barang-barang tersebut nantinya akan di tempatkan di kantor Perangkat Desa Beji. Aktor-aktor yang terlibat dalam program belanja aparat barang dan jasa yaitu Perangkat Desa Beji dan Aparat Penegak Hukum (APH). Aparat Penegak Hukum menilai bahwa alat-alat kantor berupa printer dan seperangkat computer yang ada masih dapat digunakan sehingga belum waktunya untuk membeli yang baru.

Ketersediaan alat-alat perlengkapan kantor memudahkan perangkat Desa Beji menjalankan tugas dan meminimalisir pemborosan. Perangkat Desa Beji sudah saling percaya bahwa rekan kerjanya sudah mampu menggunakan alat dan barang persediaan kantor secara maksimal. Tidak ada aturan yang baku atau mengikat setiap perangkat maksimal menggunakan berapa lembar kertas setiap bulan atau minggunya, jadi berprinsip “kalau butuh ya pakai saja”. Ruang seluas 8 kali 4 meter di isi oleh 8 orang dengan pintu selalu terbuka sehingga ruangan tanpa AC, ruang kaur umum terpisah dengan yang lain, ruang Kepala Desa juga terpisah dengan yang lain. keluar masuk udara mengandalkan jendela dan pintu yang selalu terbuka.

Implementasi Program Dukungan Penanaman Modal Desa Beji

Program dukungan penanaman modal belum dapat terlaksana. Aktor yang terlibat dalam program Program Dukungan Penanaman Modal adalah pemerintah dan anggota BUMDesa Beji. Tujuan dari Program Dukungan Penanaman Modal Desa Beji merupakan menghidupkan BUMDesa Beji yang terbentuk sejak tahun 2015 namun belum memberikan pemasukan bagi Desa Beji. Program dukungan penanaman modal belum berhasil mendapatkan narasumber yang tepat. Selain anggota BUMDesa Beji yang belum siap untuk menjaga kekompakan anggota dari pihak penyelenggara yaitu Pemdes pun belum mendapatkan narasumber yang dianggap mantap dalam menyampaikan materi.

Pada mulanya sebelum diadakan program terdapat BUMDesa Beji yang sudah terbentuk. Namun BUMDesa Beji belum dapat memanfaatkan modal yang diberikan. Untuk dapat mencairkan program anggota BUMDesa Beji harus mengusulkan jenis kegiatan usaha apa yang akan dijalankan dan bagaimana tahapannya. Anggota BUMDes belum memahami hal tersebut sehingga belum dapat mencairkan dana, walaupun sudah dijelaskan oleh pemerintah desa namun masih saja belum dijalankan. Objek dari program dukungan permodalan adalah anggota BUMDesa Beji, namun penggagas dari program dukungan penanaman modal adalah pemerintah Desa Beji.

Implementasi Program Perdagangan Perindustrian Kios Desa Beji

Kios pasar ikan Desa Beji masih membutuhkan tambahan fasilitas guna menambah kenyamanan di pasar ikan Desa Beji. Setiap tahun Pemerintah Desa Beji selalu mengalokasikan dana untuk pembenahan pasar Ikan. Aktor-aktor yang terlibat yaitu perangkat Desa Beji dan penyewa kios pasar ikan Desa Beji. Dengan adanya kios pasar ikan Desa Beji budaya memelihara ikan menjadi lestari. Kebingungan warga kemana akan menjual ikan dan menemukan pembeli yang tepat hingga harga jual yang layak saat ini sudah tidak lagi menjadi persoalan. Pelaksanaan pembenahan pasar ikan dilakukan oleh pemerintah Desa Beji. Pasar ikan Desa Beji berada di dusun dua, oleh sebab itu peran dari kepala dusun/Kadus sangat penting. Kios pasar ikan Desa Beji sanggup memenuhi kebutuhan ikan dalam dan luar Desa Beji.

Implementasi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Kedungbanteng

Maraknya alih lahan di Desa Kedungbanteng membuat perubahan data pemetaan lahan seing dilakukan. Banyak lahan pekarangan yang alih fungsi menjadi rumah sehingga terbentuk RT baru dan otomatis nilai pajaknya bertambah. Ada juga permintaan tanah dengan satu sertifikat tanah di pecah menjadi dua, dan sebaliknya. Peningkatan kapasitas aparatur berhasil meningkatkan kinerja perangkat Desa Kedungbanteng. Sayangnya tidak semua perangkat Desa Kedungbanteng mengikuti pelatihan walaupun pelatihan tersebut dianjurkan untuk seluruh perangkat desa, perangkat Desa Kedungbanteng yang tidak mengikuti pelatihan menginginkan pelatihan dilakukan bagi perangkat Desa yang masih muda saja. Perangkat Desa Kedungbanteng menyampaikan bahwa 20% lahan pertanian beralih fungsi menjadi tempat tinggal penduduk. Hal tersebut menjadi urgensi program pemetaan lahan desa dilakukan. Penggunaan data pemetaan wilayah RT/RW dan letak rumah digunakan pula untuk menentukan nomor pokok wajib pajak. Data tersebut harus selalu diperbaharui saat ada perpecahan lahan perumahan.

Implementasi Program Penyuluhan Keluarga Berencana

Tingginya angka kelahiran di Desa Kedungbanteng di tahun 2018. Angka kelahiran di Desa Kedungbanteng merupakan yang tertinggi ke dua di kecamatan kesungbanteng. Sebanyak 47 bayi lahir tercatat di Desa Kedungbanteng. Perlunya penyuluhan kembali program keluarga berencana dirasa perlu dilakukan. Program penyuluhan keluarga berebcana menggandeng pihak dari puskesmas kecamatan

Kedungbanteng bagian kesehatan masyarakat guna memberi wawasan pasangan usia subur, pelaksanaan penyuluhan keluarga berencana juga menyertakan kader PKK sebagai penggerak supaya warga mau ikut berkontribusi menyebarkan informasi. Tingginya angka kelahiran di Desa Kedungbanteng disebabkan masyarakat desa kedungbanteng merasa belum cukup memiliki dua anak, saat kedua anak sudah dewasa banyak keluarga yang merasa kesepian ditinggal anak sekolah sehingga memutuskan menambah jumlah momongan. Penurunan angka kelahiran dianggap belum berhasil di Desa Kedungbanteng ditahun 2021 sebanyak 74 angka kelahiran, hal ini menunjukkan kenaikan angka kelahiran dibanding tahun 2019.

Implementasi Program Perdagangan Perindustrian Kue Basah

Peningkatan minat usaha dikalangan ibu rumah tangga di Desa Kedungbanteng membuat ketua PKK mengajukan usulan program. Banyaknya sekolah yang ada diwilayah Desa Kedungbanteng membuat kebutuhan jajanan sehat untuk anak menjadi meningkat, terdapat 2 TK, 2 SD, 2 SLTP, 1 SMK, dan 1 MTS. Pelatihan diadakan di Aula Desa Kedungbanteng. Yang terlibat pada pelatihan pembuatan kue basah adalah persatuan Chef Indonesia, pembuat kue dari Prichelia Cake, perangkat Desa Kedungbanteng. Pemasukan dari perdagangan kue basah sudah mudai dirasakan oleh warga yang mengikuti pelatihan pembuatan kue basah. Hasil produksi masyarakat belum sampai pada tahap pembuatan toko kue namun sudah terus-menerus menerima pesanan. Tidak semua masyarakat yang mengikuti pelatihan kue basah mampu menjalankan bisnis namun ada beberapa yang mampu memasarkan produk lewat warung yang ada di Desa Kedungbanteng.

Implementasi Program Peningkatan Kapasitas BPD

Pemberian pengarahan dirasa diperlukan setelah anggota BPD Desa Kedungbanteng baru dilantik. Pada tahun 2019 anggota BPD Desa Kedungbanteng dilantik. Tidak semua anggota BPD yang dilantik adalah anggota lama. Program peningkatan kapasitas BPD dilakukan di Aula Balai Desa Kedungbanteng. Aktor-aktor yang berperan dan hadir dalam program peningkatan kapasitas BPD adalah perangkat Desa Kedungbanteng, anggota BPD Desa Kedungbanteng, anggota BPD desa di sekitar Desa Kedungbanteng, perwakilan dari pihak kecamatan. Narasumber dari Kecamatan Kedungbanteng, proram peningkatan kapasitas anggota BPD

menggugah konsistensi beberapa anggota BPD Desa Kedungbanteng, hingga tahun 2023 masih ada beberapa anggota BPD Desa Kedungbanteng yang belum berkontribusi secara maksimal.

Implementasi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Kalikesur

Desa Kalikesur sedang giat-giatnya membuka peluang post pendapatan asli desa. Dengan membuka badan usaha milik desa dan adaptasi peraturan untuk membuat kebijakan. Peningkatan kapasitas perangkat desa membuat perangkat Desa Kalikesur sadar akan potensi Desa Kalikesur yang belum tergali. Program peningkatan kapasitas perangkat desa dilakukan sebab kerap kali ada kebingungan pada saat ada kebijakan baru dari pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas aparatur desa mengarah pada pembuatan kebijakan supaya dalam membuat kebijakan tidak salah dan lebih efisien. Program peningkatan kapasitas mengundang narasumber dari dinkespermades dan dari kecamatan kedungbanteng. Hasil dari diskusi pemberdayaan perangkat Desa Kalikesur kini Desa Kalikesur berhasil memiliki BUMDesa dan kebijakan Pemerintah Desa Kalikesur saat ini mengarah pada peningkatan PADes.

Implementasi Program Tata Boga Desa Kalikesur

Sebagian besar ibu-ibu di Desa Kalikesur berperan sebagai ibu rumah tangga dan ingin membuka usaha. Selain ingin membuka usaha secara mandiri ibu-ibu di Desa Kalikesur juga sering gotong royong membantu tetangga apa bila ada acara hajatan. Semakin hari ibu-ibu dengan keahlian mengolah bahan baku menjadi kue kering semakin berkurang, sehingga membeli makanan jadi pada saat ada hajatan dan agenda-agenda pertemuan menjadi solusi namun memberatkan anggaran. Pelatihan program tata boga dilakukan pada bulan september. Pelatihan dilakukan di ruang pertemuan di balai Desa Kalikesur. Aktor yang berperan dalam program program tata boga di Desa Kalikesur adalah ibu-ibu PKK, pelatih memasak dari persatuan chef Indonesia, perangkat Desa Kalikesur dan remaja Desa Kalikesur yang ingin ikut berlatih. Terdapat sedikit perubahan perilaku pada warga Desa Kalikesur yang mengikuti program. Perubahan perilaku yang terlihat adalah semakin banyaknya warga yang bersedia membantu/rewang pada saat ada tetangga hajatan. Dan untuk bisnis pembuatan kue kering sebagai kelanjutan program hanya dua orang saja yang

menjalankan, disebabkan terkendala modal dan pandangan masyarakat yang belum berani berwirausaha kue kering.

Implementasi Program Perdagangan Perindustrian Joar Kios Desa Kalikesur

Pemerintah Desa Kalikesur ingin Desa Kalikesur memiliki wisata alam. Maraknya pembangunan wisata desa menggugah minat pemerintah Desa Kalikesur untuk membuat wisata alam dengan sumber daya yang dimiliki Desa Kalikesur tanpa bantuan pengembang atau investor. Perencanaan pembangunan berlangsung selama tiga tahun sudah selesai atau sudah dapat digunakan sebagai tempat wisata, yaitu di tahun 2019, 2020, 2021 sudah selesai namun hingga tahun 2023 pembangunan tersebut masih berproses dan baru beberapa bagian yang selesai, bagian yang selesai yaitu bagian kios yang sudah dapat disewakan. Kendala utama pembangunan wisata alam Desa adalah pendanaan yang bergantung pada Dana Desa, sedangkan pada tahun 2019 terdapat Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan dana desa terserap untuk penanganan Covid-19, sehingga pembangunan wisata alam Desa Kalikesur terkendala. Bagian kios Joar sudah ada yang dapat dipergunakan yaitu kios-kios yang kini disewakan sehingga menambah pendapatan asli Desa Kalikesur.

Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan dilaksanakan baik itu pada masyarakat atau aparat Desa mampu menunjang proses kerjasama antar aktor. Program pemberdayaan masyarakat juga mampu berpengaruh terhadap budaya yang ada. Program pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat dan pemerintah Desa di Kecamatan Kedungbanteng rupanya menggugah kreatifitas masyarakat untuk meningkatkan penghasilan. Namun ada juga program yang belum berdampak disebabkan program tersebut belum dapat terlaksana.

Perubahan Penerima Program

Program pemberdayaan masyarakat cukup mengubah pola kehidupan masyarakat di Kecamatan Kedungbanteng. Program yang betul-betul mampu mengubah pola perilaku masyarakat adalah program yang tidak jauh dari kebiasaan masyarakat Desa di Kecamatan Kedungbanteng. Setelah mengikuti progra

pemberdayaan baik perangkat Desa maupun Masyarakat Desa semakin sadar bahwa kemandirian sangat dibutuhkan. Program pemberdayaan berupa pembenahan sarana fisik meringankan aktifitas masyarakat, adapun program yang belum dapat memberikan perubahan merupakan program yang belum terlaksana.

Kepentingan Pelaksana/Sasaran

Pemerintah desa di Kecamatan Kedungbanteng semakin tergugah untuk lebih dekat dengan warganya. Selain menambah keterampilan masyarakat program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Kepala Desa yang sedang menjabat. Untuk pemerintah Desa di Kecamatan Kedungbanteng dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan memajukan kesejahteraan warga Desa, perlu adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Sejauh ini program yang dilaksanakan dan gagal memberikan dampak cukup membuat kepercayaan masyarakat menurun. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat bukan hal yang mudah.

Masyarakat masih menganggap bahwa program pemberdayaan dari pemerintah Desa adalah bantuan yang dapat langsung digunakan. Masyarakat telah mengusulkan program yang dirasa merupakan masalah yang belum terselesaikan. Seperti kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang ingin di dapatkan secara gratis.

Manfaat Program

Program pemberdayaan yang dilaksanakan di Kecamatan Kedungbanteng belum dapat berfungsi sebagai penunjang pengembangan keilmuan. Program pemberdayaan masyarakat dan perangkat Desa bermanfaat menambah pengetahuan dan mengasah keterampilan. Program-program yang dijalankan cukup mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah Desa, sebab saat ada program yang tidak berhasil dilakukan kepercayaan warga pada pemerintah Desa menurun.

Perubahan Yang Diinginkan

Perubahan yang diinginkan setelah adanya program pemberdayaan adalah meningkatnya kreativitas masyarakat dan meningkatnya tingkat perekonomian di

Desa-Desa yang ada di Kecamatan Kedungbanteng. Perubahan yang terwujud antara lain Seperti Desa Kedungbanteng sudah semakin banyak ibu-ibu yang bergerak dibidang pembuatan makan kue basah dan di Desa Kalikesur setelah pemerintah Desa melaju dengan kebijakan pembuatan BUMDesa di sektor penggemukan kambing masyarakat menjadi semakin paham potensi yang dimiliki Desanya. Namun setelah dilaksanakan program pemerdayaan baik itu pemberdayaan aparat Desa masyarakat desa masih ada ketergantungan dari masyarakat Desa terhadap Pemerintah Desa.

Pelaksanaan Program

Kepala Desa bertanggung jawab atas keseluruhan program pemberdayaan di Desanya. Pemimpin atau penanggung jawab kegiatan berperan penting dalam pelaksanaan program. Ada Desa yang mampu melaksanakan seluruh program pemberdayaan dan sesuai dengan dana yang digunakan. Ada Desa yang belum berhasil menyelenggarakan seluruh program, dalam hal ini Kepala Desa sebagai pimpinan sangat berperan penting. Dari Desa-Desa di Kecamatan Kedungbanteng kita dapat belajar bahwa Kepala Desa mempertimbangkan segala sumber daya yang dimiliki untuk terwujudnya program pemberdayaan. Program pemberdayaan yang dapat diwujudkan adalah program yang sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Desa tersebut.

Sumber Daya Yang Digunakan

Sumber daya alam digunakan pada program-program pembangunan fisik. Wilayah Kecamatan Kedungbanteng kaya dengan sumber daya alam berupa air, batu, pasir. Pemenuhan sumber daya manusia lebih sulit dari pada sumber daya alam. Pemenuhan sumber daya manusia yang kurang baik akan dapat menggalkan program pemberdayaan. Individu dengan keahlian tertentu dan mau mengajarkan pada masyarakat dan pada perangkat Desa merupakan sumber daya manusia yang cukup langka.

Kekuasaan dan Strategi Aktor

Jenis kegiatan yang dipilih untuk program pemberdayaan masyarakat sebagian besar merupakan usulan dari pemerintah desa dan masyarakat. Koordinasi yang baik

antar aktor program merupakan kunci keberhasilan pelaksana program pemberdayaan. Kedekatan antara pemerintah Desa dan masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Strategi agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik yaitu dengan semangat patriotisme.

Kepatuhan Pelaksanaan Program

Sebagian program pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Kedungbanteng telah sesuai dengan RABDes. Program-program yang tertuli dalam RABDes merupakan turunan dari peraturan-peraturan yang dirumuskan menjadi kebijakan di tingkat Desa. Kepatuhan pelaksana program pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Kedungbanteng pada masing-masing kepala Desa sudah cukup baik. Perangkat di Kecamatan Kedungbanteng kerap kali memberi masukan kepada Kepala Desa.

Daya Tanggap

Masyarakat membutuhkan memiliki keterampilan menciptakan suatu produk yang sesuai standar dan minat beli dipasaran. Pemerintah desa membutuhkan fasilitas, keterampilan dan pengetahuan untuk dapat memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Belum selesainya pembangunan di Desa-Desa di Kecamatan Kedungbanteng membuat pemerintah Desa banyak mengarahkan dana desa untuk pembenahan sarana yang ada di Desa-Desa, contoh pembenahan saluran irigasi, pembangunan kios Desa, pembenahan jalan dan penambahan fasilitas di pasar ikan Desa Beji.

D. SIMPULAN

Dari penelitian implementasi program pemberdayaan masyarakat Desa Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan bahwa Implementasi program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kedungbanteng sudah cukup baik. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Kedungbanteng sudah berupaya melaksanakan program pemberdayaan sesuai dengan anjuran pemerintah pusat. Terdapat banyak program pemberdayaan yang dapat dilaksanakan. Adapun beberapa program yang belum dapat terlaksana dikarena ketidak sesuaian antara program dengan sumber daya yang tersedia.

Adapun hal-hal yang menyebabkan “Program Pemberdayaan” tetap mampu “berhasil”, yaitu Jiwa patriotik perangkat Desa di Kecamatan Kedungbanteng yang ingin masyarakat Desa di Kecamatan Kedungbanteng memiliki kemandirian dan kesejahteraan. Terdapat beberapa program pemberdayaan yang melalui perdebatan panjang sebelum berhasil menjadi agenda program pemberdayaan. Kemudian, Tersedianya dana desa sebagai penompang pembiayaan dan adanya pendampingan dari Dinsospermades Kabupaten Banyumas. Sedangkan hal-hal yang menyebabkan pelaksanaan “Program Pemberdayaan” belum mampu “dijalankan”, dikarenakan Sumber daya manusia pemerintah Desa di Kecamatan Kedungbanteng yang masih membutuhkan banyak pelatihan dan Pembiayaan yang bergantung pada dana Desa dan minim pendapatan asli Desa. Pendapatan asli Desa rata-rata dari penyewaan kios Desa. Badan usaha milik Desa belum semua desa dapat menjalankan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfath, Muhammad. (2018). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pengelola Persampahan Di Kota Palangkaraya, *Jurnal Borneo Administrator*, Volume 14 (1), P-ISSN : 1858-0300; E-ISSN : 2407-6767, DOI : 10.24258/jba.v14i1.321
- Alsop, Ruth & Nina Heinsohn. (2005). Structuring Analysis and Framing Indicators, World Bank Policy Research Working Paper 3510.
- Casdimin., Sofyan Sjaf & Lala M. Kolopaking. (2020). Strategi Pengembangan Pertanian Hortikultura Buah Nanas, Bogor, *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 08 (03), P-ISSN: 2302-7157, E-ISSN: 2302-7525, <https://doi.org/10.22500/8202033179>
- Ginting, Simson. (2019). Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Sebagai Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Di Belawan Kota Medan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. IV Nomor 1, ISSN: 2301-4342.
- Handayani, Soewarno. (1989). Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen. Jakarta, CV Haji Masagung.
- Khusna, Khanifatul., Ruri Fadhilah Kurniati & Mohammad Muhaimin. (2019). Pengembangan Model Pemberdayaan Petani Padi melalui Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian Surabaya, Surabaya, *Matra Pembaruan*, Vol 3 (2), E-ISSN: 2549-5283, P-ISSN: 2549-5151, DOI: 10.21787/mp.3.2.2019.89-98
- Muhadjir, Noeng. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, Rake Sarasin.

- Mulyana, Dedy. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Rizar, David., Aida Vitayala S & Amiruddin Saleh. (2018). Membangun Model Komunikasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Keberdayaan Masyarakat. *BogorJurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20, No. 1, P- ISSN 1411 - 0903 : E-ISSN: 2443-2660
- Ripley, Randall B & Franklin, Grace A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*, Chicago : The Dorsey Press.
- Siagian, Sondang P. (2004). *Teori Pengembangan Organisasi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004.
- Saputra, Romi. (2017). Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalangcagak Kecamatan Jalangcagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Pemerintah*, VOL. 9 NO. 1.
- Siti, Astri. (2019). Kapasitas Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Tasik Malaya. *Tasikmalaya (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)*, Vol. IV Nomor 1, ISSN: 2301-4342, 2657-0092 (Online).
- Tjiptono, Fandy. (2005). *Prinsip-Prinsip Total Quality Service*, Yogyakarta, Penerbit Andi,